



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BINJAI**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai lima tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai di Tahun 2025-2029 untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Akhir kata, kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini di masa yang akan datang, terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,

H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197112101992031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis menjadi bagian dalam pembangunan daerah, dimana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (SAKIP).

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah, dan program lintas wilayah. Pengesahan Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Binjai.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kota Binjai dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai dilihat dari tugas dan fungsi sebagai perangkat daerahnya adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan. Pengejawantahan dari fungsinya, maka dapat dijabarkan menjadi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang akan memunculkan inovasi-inovasi kedaerahan.

Pemetaan terhadap kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai tersebut di atas menjawab permasalahan yang selama ini mendasar adalah bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas baik secara global pada pemerintah daerah (Pemerintah Kota Binjai) dan secara parsial pada perangkat daerah Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, optimalisasi analisis data dan informasi pemerintahan daerah terhadap Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, penerapan aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, ketercapaian perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), serta Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan perlu dilakukan peningkatan yang simultan. Pengembangan terhadap penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan serta bidang ekonomi dan pembangunan, dan optimalisasi pengembangan inovasi dan teknologi (Riset dan Inovasi Daerah). Proses kinerja yang didasari dari tujuan Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional sehingga visinya tercapai menjadi BINJAI MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 8);
25. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Binjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama kurun waktu 5 Tahun serta sebagai pengendalian kegiatan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang mengacu pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara renstra bappeda dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Binjai;
2. Merumuskan rancangan program/kegiatan/sub kegiatan serta rencana pendanaan indikatif untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka memantapkan terselenggaranya program/kegiatan/subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai 2025-2029;
3. Menetapkan tolok ukur kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
4. Mengantisipasi perubahan dalam pembangunan yang dinamis;
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.3 Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;

2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Perangkat daerah, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan riset serta inovasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota, uraian tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas: a) menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, b) melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, c) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, d) melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas: a) menyusun program kerja Badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat, b) menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat, c) mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, d) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, e) mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, f) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama, g) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur, h) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja, i) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan, j) memeriksa hasil kerja bawahan, k) melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, l) melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan mengadakan pengawasan aset Badan, m) mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan, n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan, b) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip, c) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Badan, d) menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan, e) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja, f) menyusun Standar Operasional Prosedur, g) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/karsu, kartu kepegawaian, TASPEN, menyiapkan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Badan.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas: a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan, b) menyusun rencana strategis perangkat daerah, c) menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian

Kinerja, d) menyusun Indikator Kinerja Utama, e) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan, f) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, penyiapan administrasi keuangan kegiatan serta pelayanan administrasi keuangan lainnya, g) melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku, h) menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan, i) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Badan, j) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas, k) memeriksa hasil kerja bawahan, l) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

5. Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya mempunyai tugas: a) menyusun program dan rencana kerja bidang perekonomian sosial dan budaya, b) menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, tenaga kerja perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kemasyarakatan dan kelurahan, pariwisata dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, c) melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja bidang perekonomian sosial dan budaya, d) mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menetapkan rencana pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, tenaga kerja perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kemasyarakatan dan kelurahan, pariwisata dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, e) menginventarisir permasalahan di bidang perekonomian sosial budaya, f) melaksanakan pengendalian dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai bidang urusan perekonomian budaya sosial, g) mengkoordinasikan dan memadukan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang dengan unit perangkat daerah terkait lingkungan Pemerintah Daerah kota, h)

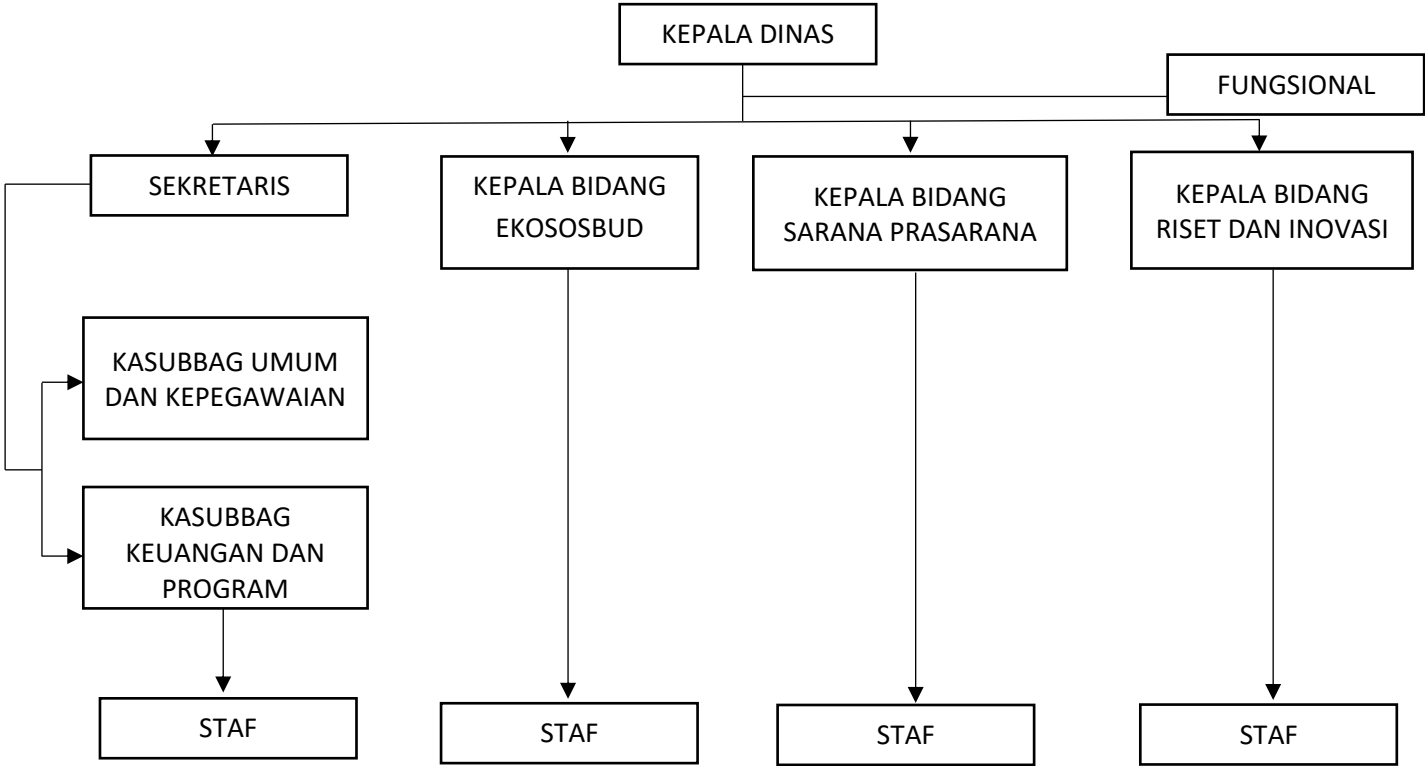
mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang dengan unit perangkat daerah terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah kota dan provinsi;

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a) menyusun program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana, b) melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, c) mengkoordinasikan dan mengintegrasikan serta mensinkronisasi perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, yang disusun oleh suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, instansi vertikal, kecamatan Kota Binjai, d) melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, e) melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, f) merencanakan dan mengolah data untuk bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahunan serta rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Binjai, g) melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup, h) mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pembangunan, i) melakukan pengendalian kegiatan pembangunan, j) melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan, k) mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pemantauan pembangunan serta mendokumentasikannya, l) mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan kerja sama antar daerah, kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.
7. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas: a) menyusun perencanaan, program, anggaran dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, b) melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan

inovasi, c) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, d) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, e) memantau dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, f) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, g) mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kota Binjai



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai adalah 41 orang, yang terdiri dari 17 laki-laki dan 24 perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, golongan / ruang, dan eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Bapperida Kota Binjai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	27
3.	D3	1
4.	SLTA	5
JUMLAH		41

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Bapperida Kota Binjai

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV/b	1
2.	IV/a	5
3.	III/d	14
4.	III/c	10
5.	III/b	2
6.	III/a	3
7.	II/d	2
JUMLAH		41

Tabel 2.3
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Bapperida Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	2
4.	Perencana	5
5.	Ketua Tim Kerja	4
6.	Pelaksana	18
JUMLAH		

- b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Binjai

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Kendaraan Roda 2	9	7 Baik, 2 Kurang Baik
3	Electric Generating Set	1	Baik
4	Mesin Ketik Standar	2	Kurang Baik
5	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
6	Mesin Hitung Manual	7	Kurang Baik
7	Mesin Hitung Elektronik	1	Baik
8	Mesin Calculator	2	Baik
9	Lemari Besi	10	Baik
10	Filling Besi / Metal	32	14 Baik, 18 kurang Baik
11	Band Kas	2	Baik
12	Lemari Kayu	12	1 Baik, 11 Kurang Baik
13	Alat Penghancur Kertas	9	Kurang Baik
14	Papan Tulis	3	Baik
15	White Board	1	Baik
16	Meja Kayu/Rotan	24	Kurang Baik
17	Meja Rapat	1	Baik
18	Kursi Rapat	68	18 Baik, 50 Kurang Baik
19	Kursi Tamu	2	1 Bak, 1 Kurang Baik
20	Kursi Tangan	3	Baik
21	Kursi Putar	106	5 Baik, 101 Kurang Baik
22	Kursi Biasa	50	Baik
23	Meja Komputer	6	Baik
24	Meja Biro	18	17 Baik, 1 Kurang Baik
25	Sofa	1	Baik
26	Kursi Plastik	10	Baik
27	Lemari Es	2	Baik
28	AC Unit	30	27 Baik, 3 Kurang Baik
29	Kipas Angin	7	6 Baik, 1 Kurang Baik
30	Kompore Gas	1	Kurang Baik
31	Teko Listrik	1	Baik
32	Alat Dapur Lainnya	45	1 Baik, 44 Kurang Baik
33	Televisi	6	5 Baik, 1 Kurang Baik
34	Sound System	2	1 Baik, 1 kurang Baik
35	Wireless	4	Kurang Baik
36	Tangga Aluminium	1	Baik
37	Dispenser	1	Baik
38	Handy Cam	2	1 Baik, 1 Baik
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
40	Kain Gorden	4	Baik
41	PC Unit	37	15 Baik, 22 Kurang Baik
42	Lap Top	31	8 Baik, 23 Kurang Baik
43	Personal Komputer Lain-lain	1	Kurang Baik
44	Hard Disk	3	Baik
45	Printer	56	28 Baik, 28 Kurang Baik
46	Plotter	1	Baik
46	Scanner	2	Baik

47	Digitizer	1	Baik
48	Monitor	2	Baik
49	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	34	3 Baik, 31 Kurang Baik
50	Router	2	Baik
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	8	Kurang Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	4 Baik, 5 Kurang Baik
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
57	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
58	Camera + Attachment	2	Baik
59	Proyektor + Attchment	2	Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Baik
61	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	Baik
62	Digital	1	Kurang Baik
63	Lensa Kamera	3	2 Baik, 1 Kurang Baik
64	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	2	Baik
65	Facsimile	3	Kurang Baik
66	Switch Antena Lain-lain	1	Baik
67	Flashk	34	Kurang Baik
68	Exhaust Fan	1	Baik
69	Meja Kerja	6	Baik
70	Tanah Tanah Bangunan Gedung	1	Baik
71	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
72	Bangunan Konstruksi Pagar	1	Baik
73	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Baik
74	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya

perencanaan pembangunan nasional yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan sumberdaya (anggaran, sumber daya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistis dan konsisten.

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah provinsi, diharapkan dalam perencanaan pembangunan daerah mempedomani perencanaan pembangunan pemerintah provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan sumber dananya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Binjai Tahun 2021-2026 kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen)

Indikator sasaran pelembagaan sistem perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundangan-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan sistem perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2021-2025 pada lampiran tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Indikator Kinerja Utama														
		Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP			
B	Urusan Perencanaan Pembangunan														
	Indikator Kinerja Kunci														
	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
	4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
	5	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD	dokumen				2	2	2	2	2	2			
	6	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	laporan				2	2	2	2	3	3			

	7	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	laporan				1	1	1	1	2	2			
	8	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	laporan				1	1	1	1	1	2			
	9	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	laporan				1	1	1	1	1	1			
	10	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	laporan				1	1	1	1	1	1			
C	Urusan Penelitian dan Pengembangan														
	Indikator Kinerja Kunci														
	1	Buku Kajian	buku				3	5	8	2	2	11		0,40	1,38

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Kota Binjai dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 bahwa permasalahan di dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai terkait dengan pokok permasalahan yaitu **sinkronisasi Program Prioritas Nasional yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pengejawantahan pada kebijakan-kebijakan yang berbasis penelitian dan pengembangan.**

Dari pokok permasalahan tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan;
- b. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan;
- d. Kurangnya data, informasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Masih kurangnya pemahaman dari perencana di tingkat perangkat daerah dalam menentukan indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah.
- f. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- g. Hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah

Tabel

Gambaran Permasalahan Bapperida Kota Binjai terhadap Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Perencanaan yang berkualitas serta sinergis dengan pembangunan nasional dan provinsi	Dokumen RKPD mengalami keterlambatan dalam penyusunan		Penyelesaian SDG's hingga tahun 2030	Penguatan pada perencanaan pembangunan nasional	Penguatan pada perencanaan pembangunan provinsi	Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai
	Indeks Kualitas Perencanaan masih dibawah rata-rata			Prioritas Pembangunan Presiden Republik Indonesia		Perhitungan jumlah usulan musrenbang, pokok pikiran legislatif terhadap akomodir APBD jauh lebih besar kesenjangan, kedudukan proyek prioritas daerah, partisipasi dan antusias perangkat daerah dalam

						perencanaan masih kurang
	Perhitungan jumlah usulan musrenbang, pokok pikiran legislatif terhadap akomodir APBD jauh lebih besar kesenjangan, kedudukan proyek prioritas daerah, partisipasi dan antusias perangkat daerah dalam perencanaan masih kurang	Perencanaan pembangunan sinergis dengan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan				Kajian ilmiah (penelitian) dan studi kasus daerah untuk pengembangan lanjutan sebagai rekomendasi dan referensi kebijakan sangat minim dilakukan

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029 diperoleh isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Binjai sebagai berikut:

Isu Berdasarkan Pencapaian TPB

- 1) Kualitas Hidup Manusia
 - a. Penduduk Miskin
 - b. Pangan
 - c. kesehatan
 - d. pendidikan
 - e. perlindungan anak dan perempuan
- 2) Pencemaran Lingkungan Hidup
 - a. pencemaran air permukaan
 - b. energi bersih
 - c. penanganan sampah dan limbah
 - d. perilaku berkelanjutan
- 3) Sarana, Prasarana dan Fasilitas Publik
 - a. Layanan Pendidikan
 - b. Layanan Kesehatan
 - c. Layanan Perumahan
 - d. Transportasi
 - e. Jaringan Telekomunikasi
- 4) Degradasi Ekosistem dan Kebencanaan

- a. Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. Hutan dan lahan kritis
 - c. Penanganan risiko bencana alam
- 5) Pertumbuhan ekonomi yang belum berkembang, inklusif, dan berkelanjutan
- a. Nilai tambah
 - b. Produktivitas
 - c. Peran sektor keuangan
 - d. Usaha kecil (UMKM dan industri kecil)
 - e. Industri manufaktur
 - f. Penyerapan tenaga kerja formal dan informal
 - g. Upah kerja
 - h. Jaminan bagi pekerja
 - i. Risiko bencana
 - j. Perilaku ramah lingkungan
- 6) Tata Kelola Pemerintah yang belum efisien, inovatif, partisipatif dan modern
- a. Harmoni Keluarga
 - b. Ketenteraman Masyarakat
 - c. Partisipasi Perempuan
 - d. Partisipasi masyarakat
 - e. Layanan Publik
 - f. Kerjasama dengan Swasta
 - g. Kemampuan Anggaran
 - h. Pendapatan daerah
 - i. Birokrasi
 - j. Data dan informasi

Berdasarkan identifikasi isu strategis secara lebih mendalam dan jelas terkait dengan pembangunan Kota Binjai pada periode RPJMD 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai :

- a. Akses Layanan Kesehatan yang berkualitas dan inklusif
- Isu ini memerlukan kebijakan yang memastikan pemerataan fasilitas dan tenaga medis di seluruh wilayah, serta peningkatan digitalisasi layanan kesehatan untuk mempermudah akses masyarakat, termasuk penggunaan sistem telemedicine dan rekam medis elektronik yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

b. Peningkatan Kesehatan Anak dan Gizi Masyarakat

Untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat, diperlukan intervensi berbasis data yang mencakup pemberian makanan bergizi yang terarah kepada keluarga berisiko, peningkatan kualitas posyandu sebagai garda terdepan dalam deteksi dini stunting, serta penguatan sistem layanan kesehatan preventif dan promotif yang terintegrasi dengan komunitas.

c. Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama di Kota Binjai. Daerah-daerah pinggiran kota seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, serta kualitas guru yang bervariasi. Sebagian besar sekolah di daerah ini juga kekurangan sumber daya pengajaran yang berkualitas, dan banyak yang belum terintegrasi dengan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Untuk itu, perlu ada peningkatan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah, khususnya melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih inklusif, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu diperkenalkan program pelatihan keterampilan teknis dan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.

d. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Merata

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki akses ke layanan dasar, dan mendukung mobilitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini harus disertai dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, seperti penerapan arsitektur hijau, sistem pengelolaan air yang efisien, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, agar Kota Binjai dapat berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

e. Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan Kewirausahaan

Isu ini memerlukan intervensi yang lebih terarah melalui pemberian akses permodalan yang lebih mudah dan efisien, pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, serta memperkuat jaringan pemasaran digital untuk UMKM. Pemerintah juga perlu menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif bagi

usaha yang sudah memiliki legalitas untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

f. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur Pasar

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian serius di Kota Binjai, mengingat ketergantungan pada distribusi pangan dari luar daerah. Infrastruktur pasar yang tidak memadai serta sistem distribusi pangan yang belum efisien menjadi penghalang dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Di sisi lain, sektor pertanian lokal belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan, perlu ada pengembangan infrastruktur pasar yang lebih baik, dukungan kepada petani lokal, serta kemitraan antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan produksi pangan lokal dan distribusinya. Kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi pertanian modern dan pengelolaan cadangan pangan daerah juga harus diprioritaskan untuk menjaga kestabilan pasokan pangan.

g. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

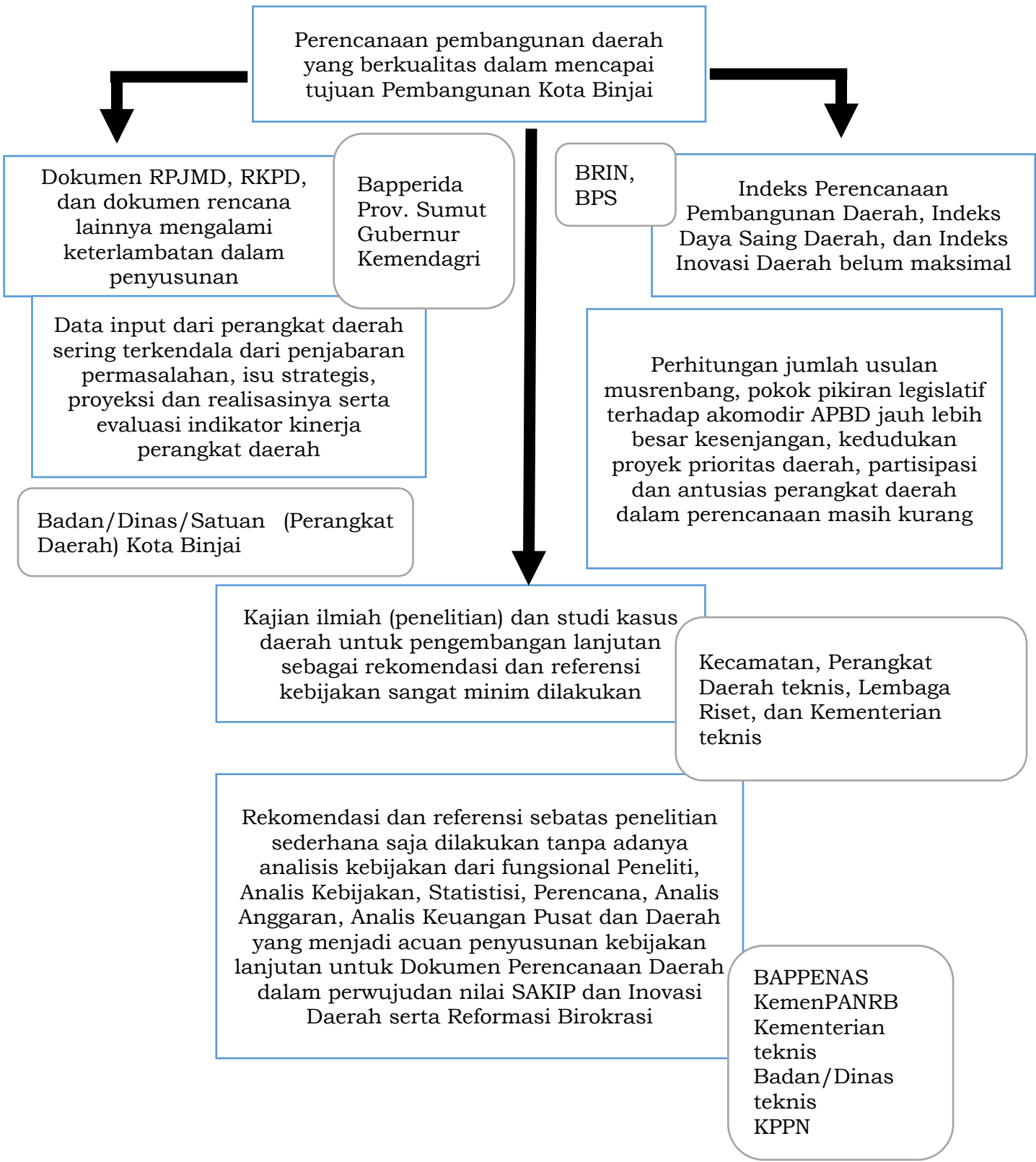
Pengelolaan lingkungan di Kota Binjai, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, membutuhkan perhatian yang serius. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan limbah, namun implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Isu ini juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti pengelolaan air dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan sampah, penerapan sistem daur ulang yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan juga harus didorong untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan terhadap isu strategis yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai, dapat dilihat pada bagan Crosscutting Perangkat Daerah sebagai berikut sebagai penjelasan bagaimana tugas dan fungsi pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

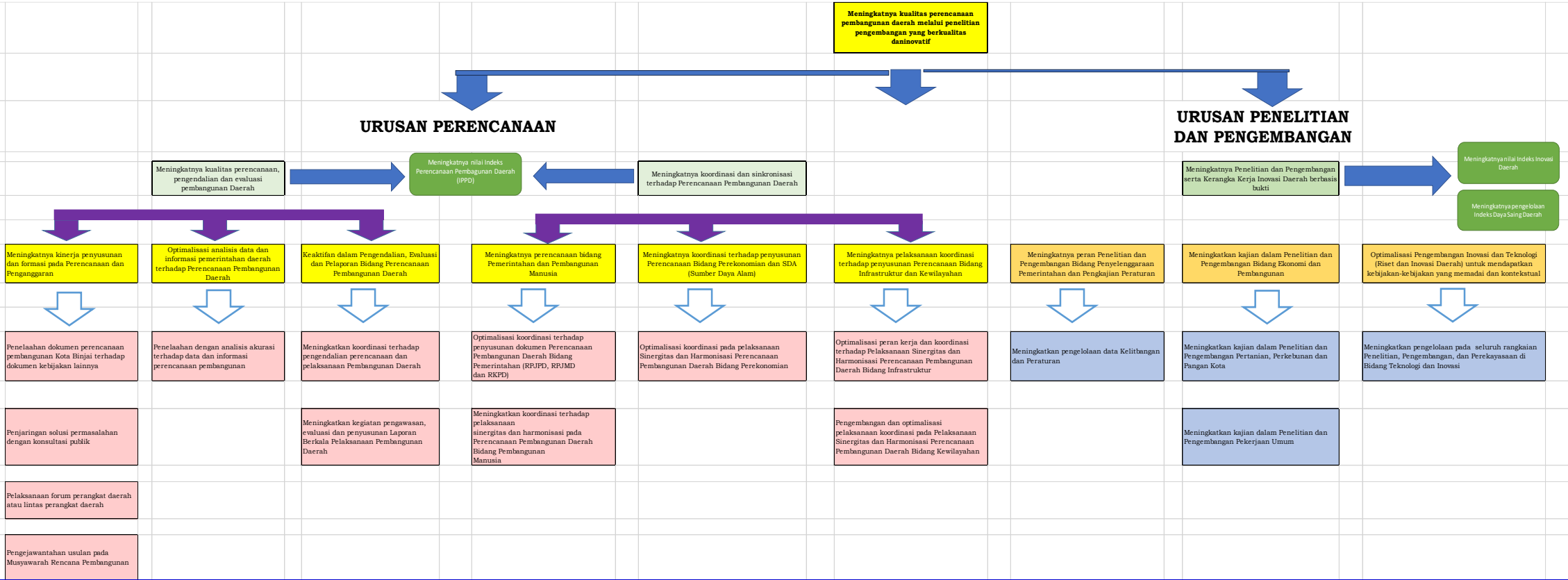
dan Inovasi Daerah Kota Binjai dapat memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, sebagai berikut:

Bagan Crosscutting

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai



Bagan Pohon Kinerja



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai memiliki penekanan pada mewujudkan **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif.**

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: **Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah**

Sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Binjai adalah:

- (1) Meningkatnya perencanaan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan nasional**
- (2) Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berbasis data**

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Outcome Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan - Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif - Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat - Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	74,11	75	77	78	79	80	82
			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	70	75	77	78	81	82	85
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan nasional	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	91,05	92	93	93	95	97	99
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	97	98	98	99	99	100	100

			(Persentase)							
		Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berbasis data	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	37,92	52,35	53,07	53,79	54,50	55,22	55,94
			Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB ((%))	0,47	0,51	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68
			Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,75	3,75	3,90	4,10	4,15	4,35	4,4

3.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Binjai. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Bapperida Kota Binjai Tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah.
2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut

- a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Perekonomian

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- c. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan yang inovatif berbasis bukti bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Riset dan Inovasi Daerah

4. Meningkatkan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan Pemanfaatan dan Pengoptimalan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek secara bertahan dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai dengan kerangka berpikir yang menjawab permasalahan umum dengan tujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai memunculkan proyeksi terhadap dokumen perencanaan yang berkualitas. Kebijakan yang saat ini di atur dalam peraturan perundangan-undangan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan seluruh turunan penyusunan dokumen perencanaan baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan lainnya setingkat Kementerian atau Lembaga.

Proses pengembangan dari perwujudan perencanaan yang berkualitas melihat dari pengembangan:

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai
- (2) Grand Design Kota dimana tahapan pengembangannya merupakan bagian dari penelitian atau kajian yang dapat diharapkan inovasi daerah.
- (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- (4) Inovasi Kedaerahan
- (5) Peningkatan Kualitas Kebijakan berdasarkan Penelitian dan Pengembangan
- (6) Reformasi Birokrasi
- (7) Dokumen perencanaan setingkat provinsi

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Menggunakan Big Data dan AI untuk pengambilan keputusan, pemantauan real-time dan optimalisasi anggaran daerah	Mengintegrasikan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2	Penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pengetahuan dan Teknologi, kajian, penelitian dan pengembangan	Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform digital yang terpadu dan efisien	Pemanfaatan dan pengelolaan platform pemerintah pusat dalam pengaplikasian proses perencanaan pembangunan daerah
3		Meningkatkan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima	Mensinergiskan program pengembangan mentalitas fungsional perencana dan peneliti
4		Memanfaatkan teknologi digital untk mendukung efisiensi kerja dan transparansi dalam penyelenggaraan publik	Matrikulasi terhadap efektifitas dan efisien penyusunan dokumen perencanaan melalui pengelolaan aplikasi SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri
5	Penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pengetahuan dan Teknologi, kajian, penelitian dan pengembangan	Mendorong kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas digital dalam pengembangan kapasitas SDM pemerintahan	Melaksanakan penyusunan Grand Design Penelitian dan Roadmap Riset dan Inovasi Daerah, Rencana Aksi Daerah terkait <i>research and development</i>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Rencana program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Bappeda dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2025-2029. Adapun Program-Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai, yaitu:

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
- Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif - Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat - Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya - Meningkatnya aksesibilitas masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	

terhadap layanan pemerintahan						
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan nasional			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	5.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

				Meningkatnya Kapasitas Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

				Meningkatnya Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya Pengelolaan pada Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan

					Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Meningkatnya Manajemen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

						Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

					Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Pengelolaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

						Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

						Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kualitas perencanaan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI

			pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Capaian Aksi HAM (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang

					Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

						Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan di	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang

				Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

					dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berbasis data			Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	
					Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB ((%))	

					Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan

					Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	5.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	5.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian

					Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Meningkatnya Kapasitas Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Meningkatnya Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya Pengelolaan pada Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Manajemen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

				Pengkajian Peraturan		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
				Meningkatnya Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kedaerahan yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

				dalam Pengembangan Potensi Unggulan		
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
				Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

					Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Meningkatnya Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

			pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Meningkatnya Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

					Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	Bidang Pemerintahan Umum
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

			meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Meningkatnya Hasil Fasilitas, Pembinaan dan Supervisi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01.0015 - Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi

						Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

			meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Meningkatnya Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

			dalam pembangunan			
				Meningkatnya Hasil Penngelolaan Penelitian dan Pengembangan, Diseminasi dan Peraturan atau Kebijakan yang Diteliti terhadap Pemanfaatannya	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
				Meningkatnya Hasil Pengelolaan Inovasi dan Inovasi Kedaerahan terhadap	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

				Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi

					Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan

						pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
					Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0021 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

			daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah			
				Meningkatnya Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Meningkatnya Hasil Inovasi dan Inovasi Kedaerahan dalam Pengembangan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

				Potensi Unggulan Daerah		
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				Meningkatnya Hasil Inovasi dan Inovasi Kedaerahan dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	5.05.03.2.02.0005 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

				Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terhadap Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,

						pengkajian, dan penerapan
				Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terhadap Hasil Inovasi dan Inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana

						pendukung Riset dan Inovasi di daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0022 - Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0024 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
5.01 - PERENCANAAN				13.851.131.730		14.607.999.217		15.177.192.403		15.876.988.973		15.771.156.085			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.906.131.730		10.440.999.217		10.947.192.403		11.536.988.973		11.361.156.085			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	91	95	9.906.131.730	95	10.440.999.217	95	10.947.192.403	97	11.536.988.973	98	11.361.156.085	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.782.000		45.782.000		45.782.000		45.782.000		52.200.000			
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)			45.782.000		45.782.000		45.782.000		45.782.000		52.200.000			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1				1				1				1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2				2				2				2
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				1

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	28	35		35		35		35		37		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)												
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.500.000	
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.782.000		1.782.000		1.782.000		1.782.000		2.200.000	

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.782.000	1	1.782.000	1	1.782.000	1	1.782.000	1	2.200.000	
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		37.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	37.000.000	
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	28	35	1.000.000	35	1.000.000	35	1.000.000	35	1.000.000	37	1.500.000	
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
5.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0		0		0		0		0	
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)			0		0		0		0		0	

5.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0		0		0		0		0	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)			0		0		0		0		0	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.731.000.000		7.095.900.000		7.450.695.000		7.833.429.750		7.314.390.000	
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	6.731.000.000	1	7.095.900.000	1	7.450.695.000	1	7.833.429.750	1	7.314.390.000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50		53		55		57		59		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.358.000.000		6.637.400.000		6.966.040.000		7.315.979.750		6.743.520.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50	6.358.000.000	53	6.637.400.000	55	6.966.040.000	57	7.315.979.750	59	6.743.520.000	
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000		375.000.000		390.500.000		410.000.000		450.000.000	

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	375.000.000	2	390.500.000	2	410.000.000	2	450.000.000	
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.000.000		39.000.000		42.000.000		45.000.000		49.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	39.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	1	49.000.000	
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15.000.000		17.000.000		20.000.000		23.000.000		27.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	1	27.000.000	
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		17.000.000		19.000.000		24.000.000		27.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	24.000.000	1	27.000.000	
5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000		7.000.000		9.300.000		11.000.000		13.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.300.000	1	11.000.000	1	13.000.000	
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.500.000		1.750.000		1.950.000		2.350.000		2.570.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.750.000	1	1.950.000	1	2.350.000	1	2.570.000	
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000		1.750.000		1.905.000		2.100.000		2.300.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.750.000	1	1.905.000	1	2.100.000	1	2.300.000	
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				350.000.000		367.500.000		385.875.000		405.168.750		425.427.188	

Penyelenggaraan Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	350.000.000	1	367.500.000	1	385.875.000	1	405.168.750	1	425.427.188	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		67.500.000		85.875.000		105.168.750		125.427.188	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	67.500.000	1	85.875.000	1	105.168.750	1	125.427.188	
5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				153.870.000		160.063.500		159.500.000		166.000.000		173.200.000	
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	153.870.000	1	160.063.500	1	159.500.000	1	166.000.000	1	173.200.000	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30		30		30		30		30		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	35		37		35		37		37		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23.870.000		30.063.500		29.500.000		36.000.000		43.200.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	35	23.870.000	37	30.063.500	35	29.500.000	37	36.000.000	37	43.200.000	
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.507.650.000		1.598.032.500		1.692.934.125		1.792.580.831		1.897.209.873	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	1.507.650.000	12	1.598.032.500	12	1.692.934.125	12	1.792.580.831	12	1.897.209.873	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36				36				36		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	27	30		30		30		30		30		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	124	150		155		160		167		172		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24		24		24		24		24		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	
5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	27	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				807.650.000		898.032.500		992.934.125		1.092.580.831		1.197.209.873	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	124	150	807.650.000	155	898.032.500	160	992.934.125	167	1.092.580.831	172	1.197.209.873	
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				399.257.000		419.219.850		420.180.843		462.189.885		485.299.379	
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	399.257.000	1	419.219.850	1	420.180.843	1	462.189.885	1	485.299.379	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0		

	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	2		1		1		2		2		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		199.219.850		280.180.843		312.189.885		325.299.379	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000	1	199.219.850	1	280.180.843	1	312.189.885	1	325.299.379	
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				99.257.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	2	99.257.000	1	30.000.000	1	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		90.000.000		0		0		0	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				367.552.730		385.930.367		405.225.885		425.488.229		446.762.641	
Pengelolaan dan Pengorganisasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	367.552.730	24	385.930.367	24	405.225.885	24	425.488.229	24	446.762.641	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.552.730		155.930.367		165.225.885		175.488.229		186.762.641	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	147.552.730	12	155.930.367	12	165.225.885	12	175.488.229	12	186.762.641	
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				351.020.000		368.571.000		386.999.550		406.349.528		566.667.004	
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10	351.020.000	10	368.571.000	10	386.999.550	10	406.349.528	10	566.667.004	
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0		500		0		0		1.500		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	10		10		10		10		10		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5		5		5		5		5		
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				101.020.000		118.571.000		136.999.550		156.349.528		186.667.004	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	101.020.000	3	118.571.000	3	136.999.550	3	156.349.528	3	186.667.004	
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	100.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	
5.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000		10.000.000		30.000.000		30.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10	30.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	10.000.000	
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		10.000.000		30.000.000		30.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	10	30.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	10.000.000	
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		50.000.000		0		0		160.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0	500	50.000.000	0	0	0	0	1.500	160.000.000	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.110.000.000		1.310.000.000		1.340.000.000		1.380.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	97	98	1.110.000.000	99	1.310.000.000	99	1.340.000.000	100	1.380.000.000	100	1.400.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	97	99		99		100		100		100		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				495.000.000		695.000.000		725.000.000		765.000.000		785.000.000	
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	1	495.000.000	1	695.000.000	1	725.000.000	2	765.000.000	1	785.000.000	
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	1		1		1		1		1		
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)												
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		2		1		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		2		1		
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				20.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		170.000.000		200.000.000		240.000.000		260.000.000	

Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	1	150.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	1	260.000.000	
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	2		2		2		2		2		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Jumlah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.835.000.000		2.857.000.000		2.890.000.000		2.960.000.000		3.010.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	97	98	650.000.000	99	650.000.000	99	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	1		1		1		1		1		

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	97	98	850.000.000	99	850.000.000	99	850.000.000	100	865.000.000	100	900.000.000	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				850.000.000		850.000.000		850.000.000		865.000.000		900.000.000	

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	865.000.000	2	900.000.000	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	3		3		3		2		3		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1		1		1		1		2		
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		75.000.000		100.000.000	

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	2	75.000.000	3	100.000.000	
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	

	Pembangunan Manusia (Laporan)												
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				150.000.000		150.000.000		150.000.000		190.000.000		200.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	190.000.000	7	200.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	97	98	1.335.000.000	99	1.357.000.000	100	1.390.000.000	100	1.445.000.000	100	1.460.000.000	
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.335.000.000		1.357.000.000		1.390.000.000		1.445.000.000		1.460.000.000	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	1.335.000.000	2	1.357.000.000	2	1.390.000.000	2	1.445.000.000	2	1.460.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000		320.000.000		350.000.000		400.000.000		410.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	300.000.000	2	320.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	410.000.000	
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				45.000.000		47.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	45.000.000	1	47.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				600.000.000		620.000.000		660.000.000		700.000.000		750.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan, - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, - Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,75	3,9	200.000.000	4,1	200.000.000	4,15	200.000.000	4,35	200.000.000	4,4	200.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				0		0		0		0		0	
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				0		0		0		0		0	
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0		0		0		0		0	
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0		0		0		0		0	
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				0		0		0		0		0	
Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kedaerahan				0		0		0		0		0	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				400.000.000		420.000.000		460.000.000		500.000.000		550.000.000	
-Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan, - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah, - Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	37,92	53,07	400.000.000	53,79	420.000.000	54,5	460.000.000	55,22	500.000.000	55,94	550.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				0		0		0		0		0	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan, Diseminasi dan Peraturan atau Kebijakan yang Diteliti				0		0		0		0		0	
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				400.000.000		420.000.000		460.000.000		500.000.000		550.000.000	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Inovasi dan Inovasi Kedaerahan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	2	400.000.000	2	420.000.000	2	460.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				200.000.000		210.000.000		230.000.000		250.000.000		275.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	2	200.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				200.000.000		210.000.000		230.000.000		250.000.000		275.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	2	200.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	

TABEL 4.4

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>		<i>(04)</i>
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
				5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

				5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
				5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
				5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan

				Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
				5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
				5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

	PEMBANGUNAN DAERAH			
				5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang termamfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Meningkatnya kajian yang termamfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
				5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

				Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
				5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
				5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
		Meningkatnya kajian yang termamfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah		5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

		dalam pengembangan potensi unggulan		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
				5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

				5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
				5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
				5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
				5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
				5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
				5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam		5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model

		perencanaan pembangunan		Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
				5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan		5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset

		potensi unggulan daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi		5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi

		terkait riset dan inovasi di daerah		
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
		Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
				5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
				5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
				5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan

				perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.

				5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
		Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		5.05.03.2.02.0024 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi		5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset

		daerah dalam pembangunan		
--	--	--------------------------	--	--

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring RPJMD maka Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,75	3,8	3,9	4,1	4,15	4,35	4,4	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	74,11	75	77	78	79	80	82	
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	70	75	77	78	81	82	85	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	97	98	98	99	99	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	97	98	98	99	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	97	98	99	99	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	97	98	98	99	99	100	100	
7	Persentase Keselarasan	Persentase	97	98	98	99	99	100	100	

	RPJMD dengan Renstra PD									
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	74,11	75	77	78	79	80	82
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	70	75	77	78	81	82	85
3.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	37,92	52,35	53,07	53,79	54,5	55,22	55,94
4.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	91,05	92	93	93	95	97	99
5.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	(%)	0,0031	0,005	0,001	0,01	0,1	0,1	0,1
6.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	97	98	98	99	99	100	100
7.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,75	3	3,9	4,1	4,15	4,35	4,4

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMD. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masing-masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahun dengan fokus pada output dan outcome yang ditargetkan.

Proyeksi perencanaan yang dilakukan selama ini sudah terpusat pada program-program prioritas namun masih banyak indikator-indikator kinerja yang perlu dikembangkan dengan melihat *outcome* yang didapatkan dari program tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 optimis dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan berdasarkan penelitian dan pengembangan dengan mendapatkan Inovasi Kedaerahan yang berbasis bukti.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,

H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197112101992031005